

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Pemerintah Daerah sebagai *service provider* dan *service arranger* memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat.

Namun demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Oleh karena itu upaya perbaikan dalam memberikan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Tingkat kinerja instansi pemerintah perlu dievaluasi dan dilaporkan karena sebagai gambaran dari tingkat keberhasilan instansi dalam mengelola sumber dayanya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana strategik.

Kinerja menurut M.Prawiro (2020:1) adalah suatu prestasi kerja atau hasil kerja seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Donelly (1994:210) mengemukakan bahwa kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mengerjakan tugas serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja pegawai dalam suatu organisasi perlu diukur atau dinilai, agar dapat diketahui apakah kinerja pegawai itu baik atau buruk.

Pada dasarnya seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya diharapkan untuk menunjukkan suatu *performance* yang terbaik yang bisa ditunjukkan oleh pegawai tersebut. Mereka dituntut agar mengusahakan bentuk tingkah laku yang spontan dan inovatif. Apabila pegawai bekerja secara produktif dan memperbesar serta memperlancar tercapainya tujuan organisasi, maka efektivitas kerja akan meningkat. Konsep tingkat efektivitas menunjukkan pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Semakin banyak rencana yang dicapai semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu organisasi pemerintah maupun swasta sesuai tujuan yang hendak dicapai.

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang memiliki potensi terhadap terjadinya beberapa jenis bencana. Jenis bencana yang sering terjadi pada Kota Tanjungpinang adalah banjir, kebakaran dan longsor. Salah satu instansi pemerintahan yang memberi pelayanan dalam penanggulangan bencana kepada masyarakat yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Tanjungpinang yang memiliki peranan dalam penanggulangan dan mengantisipasi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak hanya bertanggungjawab pada saat terjadinya bencana, tetapi bertanggungjawab juga pada pra-bencana dan pasca bencana. Untuk itu dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari adanya strategi dari instansi tersebut untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai.

Di Kota Tanjungpinang merupakan kota yang rawan terjadinya bencana seperti banjir, kebakaran dan longsor. Berdasarkan catatan yang telah dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang, terjadi peningkatan kejadian bencana selama tahun 2021 dibandingkan tahun sebelum sebelumnya. Yang dimana berdasarkan data yang didapat selama kurun waktu 2021 hingga November ini BPBD telah menangani kasus 362 kasus bencana. Sedangkan untuk tahun 2020 sebelumnya jumlah kasus yang ditangani BPBD hanya berjumlah sekitar 230 kasus. Ini berarti dalam kurun waktu setahun dari 2020 ke 2021 terjadi peningkatan kasus bencana alam yang cukup signifikan terjadi dikota Tanjungpinang. Diantara jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2021 tersebut, jumlah kasus yang dominan terjadi pada Kota Tanjungpinang yaitu bencana banjir. Daerah di Kota Tanjungpinang yang rawan terkena bencana banjir ialah Kecamatan Tanjungpinang Timur, Tanjung Unggat, Jl Bhayangkara, Makam Pahlawan KM.5, Jl Satria KM.11, Jl Nusantara KM.13, Perum Gesya Jl RH Fisabilillah KM.8 dan Kampung Pisang serta beberapa daerah lainnya yang menjadi langganan banjir.

Bencana banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia yang dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan bencana banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Penyebab banjir sendiri dapat mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan muka air laut ataupun dapat disebabkan oleh tersumbatnya tempat aliran air atau parit oleh sampah masyarakat. Maka dari itu salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas bencana alam tersebut yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang.

Kinerja pegawai yang baik secara langsung akan mempengaruhi kinerja lembaga, dan untuk memperbaiki kinerja pegawai tentu merupakan suatu pekerjaan yang memakan waktu dan proses yang panjang. Selain dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan, juga dilakukan penilaian terhadap tingkat keberhasilan kinerja yang telah dilakukan oleh para pegawainya. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan yang telah dicapai di dalam meningkatkan kompetensi pegawai, penilaian terhadap kinerja juga bermanfaat sebagai tolok ukur yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja pegawai yang bersangkutan. Tingkat keberhasilan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terlepas dari adanya strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran dari kinerja tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan mengembangkan kelurahan Tangguh bencana

2. Meningkatkan ketersediaan logistik dan Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana

Untuk mencapai strategi diatas, tentu tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan strategi tersebut. Maka dari itu sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena melalui sarana dan prasarana nantinya akan memberikan dampak baik bagi kinerja yang akan diberikan oleh para pegawai dari instansi tersebut. Sarana dan prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri berasal dari APBD Kota Tanjungpinang dan juga hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sarana dan prasarana ini diharapkan mampu mendorong dan membantu kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dalam penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh *human error* atau kesalahan dari manusia itu sendiri (Tanjungpinang, 2019).

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis BPBD Kota Tanjungpinang. Dokumen rencana kinerja BPBD Tanjungpinang ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program, sasaran, tujuan, visi dan misi BPBD Tanjungpinang Tahun 2020 yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Kinerja BPBD Kota Tanjungpinang dalam penanggulangan bencana banjir dapat dikatakan masih belum maksimal karena dapat kita lihat bahwa sepanjang tahun 2021 terdapatnya jumlah kasus banjir yang meningkat yaitu 109 kasus banjir. Ini dapat diakibatkan oleh masih terdapatnya SDM yang tidak kompeten pada saat terjadi bencana, kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang segala aktivitas yang ingin dilakukan oleh instansi tersebut pada saat penanggulangan bencana serta dapat disebabkan oleh kurangnya keikutsertaan masyarakat pada saat terjadinya bencana.

Pemerintahan yang baik merupakan pemerintah yang responsif dalam upaya memecahkan beragam masalah dan harus mampu lebih proaktif dalam menanggapi masalah. Pada hakikatnya, setiap organisasi didirikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik dalam pelaksanaannya. Seberapa besar pencapaian organisasi merupakan gambaran dari kinerja suatu organisasi tersebut. Dari permasalahan atau fenomena diatas yaitu masih rendahnya pencapaian atas kinerja yang diberikan dalam menanggulangi bencana banjir daerah di Kota Tanjungpinang. Maka dari kesimpulan fenomena diatas peneliti dapat mengambil judul “Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Tanjungpinang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini

yaitu Bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan bencana banjir di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang dalam penanggulangan bencana banjir
2. Untuk menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan ilmu terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperkuat teori-teori serta dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi penulisan lebih lanjut yang berkaitan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Dapat memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan agar tujuan dapat tercapai dengan baik.

b. Masyarakat

Untuk bahan informasi agar lebih memahami bahwa masukan dan ide dari masyarakat sangat diperlukan untuk dapat tercapainya kinerja pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Mahasiswa

Sebagai referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya.

